

# Istilah, Suara, dan Sudut Pandang

*Beberapa prinsip dasar program penelitian Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia 1945-50*

## Pendahuluan

Memorandum ringkas ini yang telah disepakati bersama oleh Dewan Program Penelitian dan Dewan Penasihat Ilmiah program penelitian *Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia 1945-50* menjabarkan sejumlah konsep yang berkenaan dengan terminologi: multiperspektif, interpretasi sejarah, dan multivokal. Konsep-konsep tersebut saling berkaitan satu sama lain sebagaimana tercermin dalam rancangan program penelitian ini, dan dalam hasil-hasil akhir penelitian yang nantinya akan terbit.

Kenyataan bahwa persoalan sudut pandang, istilah, dan suara dibahas secara panjang lebar berkaitan erat dengan perdebatan politik dan sosial ihwal kolonialisme dan perang di Indonesia antara tahun 1945 dan 1949. Perdebatan tersebut terbilang cukup sengit yang bukan hanya menunjukkan bahwa sejarah tentang periode tersebut masih sangat hidup, melainkan juga bahwa beragam opini tentang isu ini kerap saling bertentangan secara diametris, termasuk bahkan oleh para kelompok generasi yang tidak memiliki ingatan pribadi tentang peristiwa tersebut. Dengan dimungkinkannya beragam sudut pandang untuk turut ambil bagian, penulisan sejarah tentang periode ini dapat memuat lebih banyak argumen dan visi yang akhirnya bisa membuka percakapan tentang peristiwa masa lalu yang kerap diperselisihkan tersebut.

## 1. Multiperspektif

Dapat dikatakan bahwa pendekatan melalui perspektif yang beragam adalah sama tuanya dengan disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Inilah yang membedakan Herodotus, pendiri historiografi Barat, dari orang-orang sezamannya: 'Ia bertekad menyajikan ragam perspektif yang amat menyeluruh.'<sup>1</sup>

Prosesnya dimulai ketika sejarawan merefleksikan, dari masa kini ke masa lalu, peristiwa-peristiwa yang 'hasil akhirnya' sudah diketahui, dan kerap memberi kesan bahwa sejarawan tersebut memiliki pengetahuan jauh lebih banyak daripada si pelaku sejarah yang sedang dikajinya. Padahal, pada saat yang bersamaan, perspektif tentang masa lalu sangat dipengaruhi oleh zaman dan masyarakat dimana sang sejarawan tersebut hidup; dan untuk alasan itulah adalah bijak kiranya apabila sejarawan selalu memastikan untuk turut merefleksikan lingkup sosial dan kekiniannya.

---

<sup>1</sup> Paul Cartledge, 'Herodotus: A Historian for All Time', *History Today* 10 Oktober 2013.

Namun, ini hanyalah satu sisi cerita saja. Jika, sebagai seorang sejarawan, Anda ingin memahami peristiwa di masa lampau, Anda harus mencoba melepaskan diri dari zaman dan masyarakat di mana Anda hidup, dan membenamkan diri, dengan segala keterbatasan yang mungkin ada, dalam motif dan perspektif yang dimiliki oleh para pelaku sejarah dalam konteks historis mereka, yang tentunya juga terbentuk oleh kekuatan-kekuatan lingkungan, kultural, sosio-ekonomi, dan politik pada zamannya. Meskipun hal ini bukanlah tugas yang ringan, pendekatan ini teramat krusial: dengan mencoba mendalami apa yang memotivasi orang di masa lampau, apa yang mereka lihat dan pikirkan, dan tempat dimana tindakan mereka dilakukan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang tindakan-tindakan orang di waktu lampau, dan dengan demikian bisa memahami jalannya sebuah peristiwa sejarah. Pendek kata, seorang sejarawan dipersyaratkan untuk menampung sudut pandang yang berbeda secara serius dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap penelaahan.

Dalam istilah epistemologis: *membenamkan diri Anda dalam aneka perspektif yang dimiliki oleh para pelaku sejarah dapat membuahkan pemahaman yang lebih baik akan sebuah peristiwa sejarah.* Dengan kata lain, multiperspektif merupakan sarana yang sangat diperlukan dan teramat penting bagi seorang sejarawan.

Pada saat yang bersamaan, memilih untuk memuat sudut pandang yang beragam adalah masalah prinsip, yakni sebuah upaya untuk lebih inklusif, agar sedapat mungkin terhindar dari bias, serta menyoroti lebih banyak sudut pandang dari pelaku sejarah yang berbeda-beda. Walaupun, karena berbagai alasan, pendekatan tersebut tidak harus cocok bagi semua orang atau untuk kelompok sosial tertentu, hal ini bisa jadi dapat memperkaya pengalaman penelitian.

Multiperspektif yang lengkap adalah sebuah cita-cita atau ambisi yang tidak akan pernah terwujud secara sepenuhnya. Hal ini karena pendekatan multiperspektif diliputi oleh banyak kendala: bukannya hanya kendala bahasa dan jarak geografis serta budaya, akan tetapi juga kendala sumber-sumber arsip, yang seringkali mencerminkan dinamika kuasa pada zamannya yang kerap memupus suara. Untuk mengatasinya, multiperspektif dapat diperoleh dengan cara pembacaan berbeda atas sumber-sumber sejarah yang ada, atau melalui pencarian sumber lain selain arsip resmi atau media, misalnya seperti benda peninggalan sejarah atau sumber lisan.

Meskipun kebijakan Pemerintah Belanda dan penggunaan kekerasan, khususnya dalam konteks sosial, politik, dan internasional adalah fokus utama dari program penelitian ini, seperti yang telah dirumuskan dalam desain penelitian, kami tetap menggarisbawahi pentingnya menampung multiperspektif. Tekad kami ini ditempuh melalui berbagai cara, beberapa di antaranya dengan:

- Menghadirkan beragam pelaku sejarah dalam konteks historis dengan penekanan pada sudut pandang mereka yang beragam
- Bekerjasama sebaik mungkin dengan para sejarawan dari Indonesia

- Merujuk kepada sebanyak mungkin sumber sejarah, dari para pelaku sejarah (dari berbagai pihak, pengamat internasional, kelompok sejarawan di Indonesia dan Belanda, dan lain-lain) (lihat juga 3)
- Pembacaan sumber-sumber resmi secara 'eksentrik', dengan menggarisbawahi pengalaman-pengalaman dan perspektif para pelaku sejarah, selain daripada perspektif lembaga-lembaga resmi
- Menyoroti perbedaan dalam terminologi dan memberi ruang kepadanya untuk turut bergaung sebagai bagian dari upaya pewujudan perspektif (lihat juga 4)

## 2. Interpretasi Sejarah

Hampir semua kisah tentang masa lampau yang kita punya adalah buah dari interpretasi. Sukar rasanya untuk memperoleh sebuah 'gambaran realistis sejarah yang objektif', yang sepenuhnya transparan seperti kaca jendela di mana kita dapat menengok keluar untuk melihat kenyataan-kenyataan sejarah. Ini disebabkan tidak ada jalan masuk menuju masa lampau yang seluruhnya komprehensif dan tidak melalui perantara.<sup>2</sup> Para sejarawan kerap menciptakan sebuah gambaran akan masa lalu dari serpihan-serpihan bahan yang termuat dalam dokumen resmi, koran, surat, berkas-berkas, dan wawancara yang terserak; para sejarawan itu membangun sebuah *tafsir* atas peristiwa-peristiwa masa lampau, dengan kata lain, mereka membuat semacam *ajakan* atau *undangan* untuk memandangi sebuah peristiwa di masa lampau melalui cara tertentu. Dalam proses ini, seninya terletak pada cara mengolah kepakaran dan keilmuan dalam menciptakan hasil penelitian yang semasuk akal mungkin.

Perbincangan antarsejarawan – yang menurut Pieter Geyl<sup>3</sup> adalah 'perbincangan tanpa ujung' – hampir selalu melibatkan aneka *tafsir* dan *sudut pandang* atas ruang dan relevansi tempat sebuah kenyataan sejarah berlangsung, bukan melulu berfokus kepada kenyataan itu sendiri. Dengan kata lain, fakta sejarah tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dimaknai lewat proses interpretasi dengan menggarisbawahi koherensi peristiwa, alih-alih membangun *landasan* atas kenyataan sejarah tersebut.<sup>4</sup> Hal inilah yang membedakan interpretasi sejarah, juga interpretasi pada sebagian besar disiplin ilmu humaniora, dari interpretasi disiplin ilmu pasti. Meski sejarawan tetap mementingkan 'interpretasi yang setia pada kenyataan', hasil akhirnya tetap

<sup>2</sup> 'Das Paradies der reinen Unmittelbarkeit ist verschlossen', menurut Ernst Cassirer, *Philosophie der symbolische Formen*, dikutip dalam Anton Mooij, *De Academische Boekengids* 41 (Oct. 2003) 15.

<sup>3</sup> 'Historiography can be seen as a discussion without end', P. Geyl, *Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving* (1946) 5.

<sup>4</sup> Cf. Frank Ankersmit, *Narrative Logic. A semantic analysis of the historian's language*. Nijhoff, The Hague, etc.: 1981. Cf., e.g., R. H. de Bock. Het onderscheid tussen feit en recht. Tussen waarheid en onzekerheid, *Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XI*, 1.2 (31-05-2011) [https://www.navigators.nl/document/ida682c7a8ea800e5ff05537e7f3feac64/tussen-waarheid-en-onzekerheid-burgerlijk-proces-praktijk-nr-xi-12-het-onderscheid-tussen-feit-en-recht?ctx=WKNL\\_CSL\\_1626](https://www.navigators.nl/document/ida682c7a8ea800e5ff05537e7f3feac64/tussen-waarheid-en-onzekerheid-burgerlijk-proces-praktijk-nr-xi-12-het-onderscheid-tussen-feit-en-recht?ctx=WKNL_CSL_1626)

akan terpengaruhi oleh sudut pandang sang sejarawan, berikut zaman dan kelompok masyarakat tempat dia bernaung. Di awal abad ke-20, kenyataan ini mengilhami Benedetto Croce yang menelurkan sebuah diktum yang lalu banyak dikutip, yaitu: 'Segala sejarah adalah sejarah kekinian [Ogni vera storia è storia contemporanea]'.<sup>5</sup>

Dengan kata lain, baik pertanyaan maupun jawaban dalam proses penulisan sejarah pasti dipengaruhi atau dibentuk oleh masa kini. Walaupun objektivitas yang dimaknai sebagai upaya meraih kebenaran absolut tentang masa lalu adalah serupa khayal, tidak akan demikian halnya apabila objektivitas tersebut kita gunakan sebagai sebuah *metode*. Pandangan bahwa hasil penelitian sejarah tidak bisa sepenuhnya 'benar' tidak berarti bahwa sejarawan diberi *carte blanche* atau kesewenangan untuk sepenuhnya melibatkan khayal dalam melakukan penelitian. Sebaliknya, karena penulisan sejarah ini adalah sebuah upaya sadar untuk meyakinkan sebuah interpretasi baru atau menyanggah interpretasi sebelumnya, seorang sejarawan dipaksa untuk berhati-hati dalam menetapkan metode penelitian. Upaya sadar tersebut juga semestinya berfungsi sebagai pemacu dalam penggunaan metodologi yang baik, pengolahan sumber-sumber sejarah, yang akhirnya berbuah kepada interpretasi baru: pendek kata, sejarawan menggunakan metode untuk menghasilkan karya sejarah baru yang juga akan dibahas atau dibantah.

Dapat diperkirakan bahwa program penelitian yang kini sedang berlangsung akan membuahakan interpretasi-interpretasi baru tentang peristiwa sejarah 1945-1949. Ini bukan saja merupakan konsekuensi langsung dari pendekatan multiperspektif dan penggunaan beragam sumber-sumber sejarah baru, akan tetapi juga oleh sebab para peneliti pada program ini dapat mengambil manfaat dari berbagai studi terbaru dan temuan-temuan yang dihasilkannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Misalnya, beberapa penelitian terakhir mulai memberikan perhatian lebih banyak kepada perkembangan politik, sosial, dan militer di berbagai daerah, sehingga menimbulkan gambaran yang jauh lebih beraragam daripada sekedar dikotomi sederhana tentang konflik antara Belanda dan Republik Indonesia.

Contoh lain adalah rekonseptualisasi periode Bersiap: sebuah istilah yang tidak lagi menggambarkan periode setelah kapitulasi Jepang ketika orang-orang keturunan Belanda menjadi korban kekerasan oleh pihak Indonesia, atau untuk lebih terangnya, korban dari permusuhan yang dilandasi oleh etnis; periode ini ditafsir menjadi sebuah periode ketika orang-orang Jepang, Cina, Indonesia, dan Inggris, atau India menjadi korban kekerasan atas dugaan bahwa mereka adalah musuh Republik. Tujuan rekonseptualisasi ini bukanlah untuk 'mengecilkan penderitaan korban yang merupakan orang Belanda', seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak, tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang jalannya peristiwa dan dinamika kekerasan yang terjadi sejak Agustus 1945.

---

<sup>5</sup> Benedetto Croce, *Teoria e storia della storiografia*, Bari 1917, 1920<sup>2</sup>, hal. 5.

### 3. Ragam suara/multivokal

Jika multiperspektif menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik akan sebuah peristiwa sejarah, multivokal menggarisbawahi cara sebuah peristiwa sejarah disuarakan; singkatnya, bagaimana peristiwa di masa lampau direpresentasikan. Atau, dengan kata lain, multivokal adalah upaya memberi jawaban atas bagaimana ragam perspektif disajikan lewat suara si pelaku sejarah; hal ini teramat penting, khususnya apabila berkenaan dengan pengalaman-pengalaman traumatik, atau ketika emosi dan ingatan seorang pelaku sejarah saling bertentangan dan tidak cocok. Bagaimanapun, pengalaman kekerasan massal yang menjadi fokus utama program penelitian ini seringkali memunculkan perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara individu atau sekelompok orang, bahkan terkadang menjadi dalih terbentuknya identitas kelompok tertentu.

Adalah Saul Friedlander, seorang sejarawan terkemuka yang kepakarannya adalah ihwal persekusi kaum Yahudi, yang menciptakan istilah 'multivokal' dalam historiografi. Dia pertama kali menyampaikan istilah tersebut dalam sebuah konferensi di tahun 1990 tentang *Probing the limits of representation - Nazism and the 'Final solution'* (Menjelajah batas representasi - Nazi dan 'Solusi akhir'). Bagi Friedlander, 'multivokal' adalah pendekatan baru untuk menulis sejarah yang memberi ruang bagi emosi, kontradiksi, paradoks, dan ragam suara, sekaligus memberi kesempatan bagi sang sejarawan untuk berjarak dari citra tradisional yang menganggap sejarawan sebagai juru kisah yang mahatahu tentang sebuah cerita yang sudah pasti kebenarannya. Menceritakan sejarah melalui cara ini tidak berarti bahwa peristiwa-peristiwa sejarah dianggap relatif kebenarannya; justru sebaliknya, peristiwa-peristiwa tersebut kini dapat ditautkan dengan lebih erat dengan cerita-cerita yang juga berbeda-beda. Selain itu, multivokal juga memberi kesempatan kepada sejarawan untuk mengungkapkan keberadaan mereka sendiri dalam cerita sejarah, dan oleh karenanya terlibat langsung dalam refleksi yang diperlukan atas peran mereka sebagai seorang penafsir.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Friedlander, pendekatan baru ini diperlukan oleh sebab sifat ekstrem dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dikajinya, yakni, penghancuran sekelompok masyarakat oleh Nazi Jerman. Dalam karya dua jilidnya yang telah diakui secara luas, *Nazi Germany and the Jews* (Nazi Jerman dan Kaum Yahudi), Friedlander menerapkan pendekatan ini dan oleh karenanya menetapkan sebuah standar baru dalam historiografi. Ia menyajikan sejumlah kesaksian korban,

---

<sup>6</sup> Menurut James E. Young: 'Bagi seorang sejarawan yang padu, ini memiliki arti historiografi yang alur narasinya terdisrupsi oleh suara sadar sang sejarawan. Sebagaimana ditulis oleh Friedlander, "sang sejarawan harus semestinya memutuskan alur linear narasi sejarah, menawarkan tafsir alternatif, menyanggah simpulan yang tak berimbang, dan tidak berhasrat untuk menutup diskusi." Interupsi semacam ini akan mengingatkan pembaca bahwa sejarah sesungguhnya dibuat dan diingat oleh seseorang dalam waktu dan tempat tertentu, dan oleh karenanya merupakan produk dari tangan dan pikiran manusia.' *At Memory's Edge. After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture*, Yale University Press 2002.

membaca buku harian, laporan, memo, dan tulisan-tulisan lain, lalu melakukan analisis setahap demi setahap terhadap berbagai lapis peristiwa sejarah yang terjadi pada saat bersamaan. Dari sini dapat dilihat betapa pendekatan multiperspektif dan multivokal saling beriringan.

Dalam program penelitian *Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia 1945-50*, suara-suara yang beragam tersebut akan dibahas secara panjang lebar, tidak terkecuali dalam laporan akhir dari subprogram Saksi dan Rekan Sezaman.

Kenyataan bahwa kami menginginkan aneka suara agar tersaji dalam studi dan hasil akhir penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari pendekatan multiperspektif; hal ini merupakan sebuah cara untuk berbincang dengan pembaca sambil sekaligus merangkul beragam perspektif sejarah yang bermacam-macam.

#### 4. Terminologi

Istilah dapat berubah-ubah dan selalu terkait dengan sudut pandang yang dipakai: bergantung kepada disiplin ilmu, individu, partai politik, lembaga, historiografi nasional, dan periodisasi. Satu gejala bisa saja digambarkan dengan istilah yang berbeda, sementara sebuah istilah bisa jadi merujuk kepada makna yang berbeda. Dalam sudut pandang Indonesia, misalnya, apa yang disebut oleh pemerintah Belanda sebagai 'aksi polisi' pada tahun 1947 dan 1948 sesungguhnya adalah aksi memerangi, sebuah agresi terhadap sebuah Republik yang baru saja berdaulat, yang sudah diakui secara *de facto* oleh sejumlah Negara, termasuk oleh Belanda sendiri, dan bahkan sudah diakui secara *de jure* oleh sebagian Negara lain.

Dari sudut hukum internasional, situasi di atas sukar untuk digambarkan. Namun demikian, sebagian besar sejarawan tetap menggunakan kata 'perang' untuk menggambarkan keseluruhan periode antara 1945-1949, sebagaimana mereka menggunakannya pada istilah 'Perang Delapan Puluh Tahun' atau Perang Yugoslavia. Dalam konteks ini, istilah 'perang' tidak digunakan dalam kerangka legal atau hukum internasional,<sup>7</sup> atau untuk menggambarkan konflik bersenjata yang biasa terjadi di antara dua negara berdaulat, melainkan untuk menggambarkan keadaan perang di mana setiap aspek masyarakat Indonesia dan Belanda terdampak oleh konflik kekerasan; keadaan perang yang menentukan mati hidupnya para serdadu atau orang-orang sipil dengan pembatasan hak-hak hidup, atau dengan cara pengenyahan; sebuah keadaan perang yang menciptakan hubungan moral, ekonomi, hukum, dan politik baru.<sup>8</sup>

Dengan demikian ada banyak istilah lain yang dapat dikaitkan dalam ragam perspektif, bergantung pada waktu, tempat, dan disiplin ilmu: 'pejuang kemerdekaan', 'pemberontak', 'pelaku dan korban', 'kedaulatan', 'legitimasi',

---

<sup>7</sup> Perlu dicatat bahwa istilah 'perang' umumnya tidak digunakan dalam hukum internasional. Piagam PBB mengacu kepada 'prohibition of the use of force' (pelarangan penggunaan kekerasan) dalam Pasal 2(4), dan Konvensi Jenewa 1949 menetapkan '*armed conflict*' (konflik bersenjata).

<sup>8</sup> Untuk deskripsi lebih rinci, lihat <https://www.ind45-50.org/en/about-programme> [2020]

'kekerasan berlebih', 'penjahat perang', 'kamp tahanan'. Adalah sebuah ketidaktepatan bila suatu gejala atau peristiwa sejarah digambarkan dengan satu istilah yang tidak lentur dan eksklusif; di banyak kasus, penggambaran semacam ini bahkan sama sekali tidak dimungkinkan. Sebagai contoh, tepatnya di periode antara 1945 dan 1950 perkembangan besar terjadi dalam hukum internasional yang lalu mengarah kepada dibuatnya konsep-konsep baru, aturan atau norma, dan kesepakatan-kesepakatan baru – yang juga berarti bahwa bahkan kerangka hukum itu sendiri tidak dapat digambarkan dengan jelas melalui sudut pandang tunggal.

Atas alasan tersebutlah program penelitian ini tidak akan mencoba memusatkan perhatian kepada penyertaan makna yang baku dan tetap. Bukan hanya karena hal tersebut tidak mungkin, tetapi juga bertentangan dengan tujuan kita sebagai sejarawan; sebagaimana diterangkan di atas, siapa saja yang bertujuan untuk memahami dinamika peristiwa 1945-1949 haruslah mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan mengenali keragaman istilah yang terkait dengannya.

Kita diharuskan untuk menjelaskan secara jernih istilah apa yang dipakai beserta alasannya, mengingat banyak istilah sarat dengan muatan-muatan moral dan politik tertentu. Hal ini juga berlaku bagi konsep-konsep analitis yang kita buat, yang mungkin berakar kepada konotasi-konotasi politik tertentu, dan pada dasarnya tidak seobjektif seperti apa yang sekilas tampak. Untuk alasan ini, alangkah bijak jika kita menggunakan istilah-istilah yang senetral mungkin, istilah yang tidak banyak memuat atau dikaitkan dengan perspektif atau satu sisi tertentu saja.

Diperlukan kesadaran diskursif tingkat tinggi saat menggunakan istilah. Sepanjang program penelitian ini dilakukan, jika perlu, kami akan menjelaskan pengertian istilah-istilah yang dipakai beserta perspektif yang terkait dengan makna yang hendak disampaikan, lalu tentang bagaimana, misalnya, istilah-istilah historis tertentu berkaitan dengan istilah hukum.

**Frank van Vree**